

INTISARI

Pemerintah sejak kemerdekaan hingga era reformasi sudah melakukan pelebagaan nilai Pancasila secara menyeluruh namun masih tetap diwarnai variasi-variasi di tengah masyarakat. Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk membantu presiden melaksanakan institusionalisasi nilai Pancasila. Proses pelebagaan nilai yang dilakukan oleh BPIP masih cukup bervariasi sama seperti pelebagaan di era sebelumnya. Permasalahan tersebut dijawab menggunakan teori institusionalisasi dari Richard Scott menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berfokus pada tiga kegiatan utama pelebagaan nilai Pancasila oleh BPIP.

Hasil dari penelitian menunjukkan variasi positif dan negatif dari tiga kegiatan utama pelebagaan nilai Pancasila oleh BPIP. Kegiatan penyusunan standar materi dan diklat Pancasila bagi guru PPKN menunjukkan transfer nilai secara ideal di kelompok masyarakat sehingga dapat menghasilkan *outcome* awal yakni mengubah perilaku masyarakat yang menjadi sasaran pelebagaan nilai Pancasila. Berbeda dengan diklat Pancasila bagi Orsospol yang menunjukkan ketidakberlanjutan transfer nilai akibat respons dari kelompok masyarakat yang cenderung resistan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah variasi dari pelebagaan nilai Pancasila yang dilakukan oleh BPIP disebabkan oleh lemahnya pilar regulatif yang menjadi landasan utama untuk diturunkan ke pilar organisasi lain yakni pilar normatif dan pilar kultural-kognitif. Lemahnya pilar ini juga berdampak pada kegiatan utama pelebagaan yang dijalankan oleh BPIP.

Kata kunci : Pancasila, institusionalisasi, BPIP

ABSTRACT

Since the independence era until the reform era, the government has institutionalized the values of Pancasila in comprehensive way, but it is still appeared many variations in the society. In 2018, President Joko Widodo established the The Agency for Fostering Pancasila Ideology of The Republic of Indonesia (BPIP) to assist the president in implementing the institutionalizing Pancasila values. The value institutionalization process that held by BPIP is still quite varied, just like institutionalization process in the previous era. This problem was answered using institutionalization theory from Richard Scott by a qualitative descriptive research method with a case study approach focusing on the three main activities of institutionalizing Pancasila values by BPIP.

The results of the research show positive and negative variations based on the three main activities in the institutionalization of Pancasila values by BPIP. The activity of preparing material standards and Pancasila ideology training for PPKN teachers show the continuity of ideal value transfer so that it can produce early outcomes that changing community behavior which have become the target of Pancasila value institutionalization. This is different from the Pancasila ideology training for Social and Political Organizations which tends to show the unsustainability of the values transfer due to resistance responses from the targeted group.

The conclusion that can be drawn from this research is that variations in the institutionalization of Pancasila values held by BPIP are caused by the weakness of the organizational pillar, namely the regulative pillar, which is the main basis to be relegated to other organizational pillars, namely the normative pillar and the cultural-cognitive pillar. The weakness of this pillar also has an impact on the main institutional activities held by BPIP.

Keywords: Pancasila, institutionalization, BPIP